



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini, dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Maluku Utara 2020-2024 yang dirumuskan dan disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebagai dokumen operasional tahunan Bappeda yang memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana indikasi pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, sekaligus sebagai tahapan dalam menjaga kesinambungan, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda secara optimal.

Berkat peran aktif tim Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara serta partisipasi dan dukungan Bidang Teknis lingkup Bappeda Provinsi Maluku Utara, akhirnya dokumen Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dapat terselesaikan. Kerjasama seperti ini kedepan akan terus ditingkatkan sehingga menghasilkan Dokumen Perencanaan yang dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi rahmat, petunjuk dan meridohi segala aktifitas dan usaha kita dalam membangun Provinsi Maluku Utara dengan karya-karya nyata.

Sofifi, Agustus 2022

Kepala Bappeda
Provinsi Maluku Utara



Salmin Jandi, SH.,M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19770717 200212 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	10
2.1.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Target Kinerja Program Tidak Tercapai	24
2.1.2 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Tersebut	24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	40
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Provinsi Maluku Utara.....	11
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara.....	25
Tabel	2.3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 Bappeda Provinsi Maluku Utara.....	26
Tabel	3.1	Matrix Keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Restra Bappeda Provinsi Maluku Utara	42
Tabel	3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Bappeda Provinsi Maluku Utara.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Provinsi Maluku Utara berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah yaitu Renja Bappeda Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023.

Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodifikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.



Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD tahun 2023 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025;



17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
18. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (lembaran daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2016 nomor 5) ;
19. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 60)
20. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.
21. Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah :

1. Untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas Pokok untuk masing-masing bidang dalam penyusunan APBD tahun 2023 yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dan menjadi kesatuan dengan APBD tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2023 adalah sebagai acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.



1.4 Sistematika

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi /Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang



seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: (1). Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2). Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (3).Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (4).Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; (5). Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan (6). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.



1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- c. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

1.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,



perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:



- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun lalu (2021) dimaksudkan untuk melihat sejauh mana implementasi program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 serta sejauh mana capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2020 – 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2021) dan realisasi Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara mengacu pada hasil laporan kinerja Bappeda Provinsi Maluku Utara dan/atau realisasi APBD Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2021.

Bappeda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050-8578 tentang Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melaksanakan dua program utama yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta satu program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
Provinsi Maluku Utara

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80					82%			
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					85,71%			
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja yang tersedia			2 Dok	2 Dok	100%			



Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023

5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.01.1.01..06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (LKJ)			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.01.1.01..07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja			1 Dok	0				
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah					67%			
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bahan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia			1 Dok	-	0,00%			
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah					0,00%			
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD			1 Dok	-				



5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100%			
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian			1 Dok	1 Dok	100,00%			
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat lainnya			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah					100%			
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dok	1 Dok	100%			



5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%			
5.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			



5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara			1 Paket	1 Paket	100%			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)					82%			
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					100%			
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dok Hasil Pelaksanaan konsultasi publik			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dok Lap. Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Dokumen Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dok RPJPD. RPJMD. RKPD			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan					67%			



		Daerah								
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD *	Dokumen hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dok	0 Dok	0			
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					80%			
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dok. Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			1 Dok	1 Dok	100%			
		Dok. LKPJ Gubernur			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah*	Dok. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah			1 Dok		%			
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dok. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan PD			1 Dok	1 Dok	100%			



5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dok. Laporan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota			2 Dok	2 Dok	100%				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)					58%				
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)					63%				
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pemerintahan			1 Dok	1 Dok	100%				
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pemerintahan			1 Dok						



5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pemerintahan			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			1 Dok					
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur			1 Dok	1 Dok	100%			



5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur			1 Dok					
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			4 Dok	4 Dok	100%			
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam ke dalam RKPD dan APBD (persen)					63%			
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang keuangan dan pendapatan			1 Dok	1 Dok	100%			



5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian			1 Dok						
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang keuangan dan pendapatan			1 Dok	1 Dok	100%				
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			1 Dok	1 Dok	100%				
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan			1 Dok	1 Dok	100%				
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan			1 Dok						



5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan			1 Dok	1 Dok	100%			
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			1 Dok	0				
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)					49%			
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai Siklus Perencanaan			100%	100%	100%			
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Bidang Infrastruktur dalam Renja yang selaras dengan RKPD			90%	40%	44%			



5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Target Kinerja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dalam Renja yang selaras dengan RKPD			90%	40%	44%			
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase target/kinerja perencanaan pembangunan pemerintah provinsi yang selaras dengan target/kinerja perencanaan pembangunan nasional serta pemerintah kab/kota bidang infrastruktur			100%	100%	100%			
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai Siklus Perencanaan*			100%					
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Bidang Kewilayahan dalam Renja yang selaras dengan RKPD*			90%					



5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Target Kinerja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Kewilayahan dalam Renja yang selaras dengan RKPD*			90%					
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase target/kinerja perencanaan pembangunan pemerintah provinsi yang selaras dengan target/kinerja perencanaan pembangunan nasional serta pemerintah kab/kota bidang kewilayahan			100%	100%	100%			

Sofifi, Juli 2022
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara

SALMIN JANIDI, SH, M.Hum
NIP. 19770717 200212 1 003



Berdasarkan table 2.1 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 secara umum mencapai target – target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hampir seluruh capaian kinerja sub kegiatan yang dilaksanakan mencapai 100% baik pada program utama maupun program penunjang dan hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang capaiannya dibawah 50%. Adapun sub kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan atau capaiannya 0% yaitu sebanyak 10 sub kegiatan pada program utama dan 2 sub kegiatan pada program penunjang disebabkan karena adanya penyesuaian atau rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.1.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Target Kinerja Program Tidak Tercapai

Faktor-faktor yang menyebabkan target kinerja program dan kegiatan tidak tercapai adalah sebagai berikut :

- Dilakukannya Penyesuaian atau rasionalisasi anggaran sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19;
- Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan rencana;
- Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar kementerian/Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan serta terbitnya peraturan-peraturan baru dipusat;

2.1.2 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab Tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk menyelesaikan Faktor Penyebab adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan pengembangan SDM rencana;
2. Perlu adanya efisiensi alokasi belanja;
3. Perlu adanya perbaikan dalam tatakelola keuangan daerah dimulai dari ketepatan waktu dalam pengesahan APBD sampai pada administrasi yang menunjang pelaksanaan APBD yang lebih efektif dan efisien;



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dalam Capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Maluku Utara menurut sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n+2)	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		-13	
1.	Persentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD Renstra, RKPD Renja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

2.3. Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bappeda

Beberapa isu penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara antara lain :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur perencana dan pendistribusian tugas yang merata;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan ketercapain target berdasarkan kualitas pengendalian dan monitoring evaluasi baik pada OPD provinsi maupun kabupaten/kota;
3. Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan penyusunan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan;
5. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan, pengendalian sampai pada monitoring dan evaluasi.



2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dan Rencana Kerja Bappeda provinsi Maluku utara tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023
Bappeda Provinsi Maluku Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
-1	-2	-3	-4	-5	-	6	-7	-8
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN					17.500.000.000	17.500.000.000	
	PERENCANAAN					17.500.000.000	17.500.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Maluku Utara	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80			5.000.000.000	5.000.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Maluku Utara	Persentase implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			1.100.000.000	1.100.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		200.000.000	200.000.000	



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Maluku Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Maluku Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Maluku Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	200.000.000	200.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Maluku Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000	300.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Maluku Utara	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	525.000.000	525.000.000



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Maluku Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Maluku Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	200.000.000	200.000.000
Administri Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Maluku Utara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100.000.000	100.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Maluku Utara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000	50.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Maluku Utara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	50.000.000	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Maluku Utara	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	950.000.000	950.000.000



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Maluku Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	300.000.000	300.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	300.000.000	300.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	200.000.000	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Maluku Utara	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.300.000.000	1.300.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Maluku Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Maluku Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	300.000.000	300.000.000



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Maluku Utara	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	100.000.000	100.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Maluku Utara dan Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	700.000.000	700.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Maluku Utara	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	650.000.000	650.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Maluku Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	150.000.000	150.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Maluku Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Maluku Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000	400.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Maluku Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	375.000.000	375.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Maluku Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Paket	375.000.000	375.000.000



PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Maluku Utara	Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	100%	5.500.000.000	5.500.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Maluku Utara	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	3.000.000.000	3.000.000.000
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000



Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	650.000.000	650.000.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sofifi	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.150.000.000	1.150.000.000
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	60 Orang	300.000.000	300.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60 Orang	300.000.000	300.000.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Maluku Utara	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	150.000.000	150.000.000



Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Maluku Utara	Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100%	1.350.000.000	1.350.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Maluku Utara	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Dokumen	500.000.000	500.000.000
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Maluku Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	350.000.000	350.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Maluku Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	7.000.000.000	7.000.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Maluku Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	2.500.000.000	2.500.000.000



*Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023*

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	15 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	15 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Dokumen	700.000.000	700.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Maluku Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	2.250.000.000	2.250.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000



Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Dokumen	350.000.000	350.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Maluku Utara	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	2.250.000.000	2.250.000.000



Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	250.000.000	250.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	450.000.000	450.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	250.000.000	250.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000



*Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023*

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	200.000.000	200.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Maluku Utara dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga yang penyusunannya sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan tujuh prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomimuntuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Maluku Utara, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 tersebut diarahkan pada tujuh proiritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dan penanggulangan kemiskinan
2. Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni social
3. Memperkuat Infrastruktur dan menjamin pelayanan dasar



4. Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan
5. Memperkuat kualitas transformasi structural dan pertumbuhan ekonomi
6. Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana
7. Mengakselerasi reformasi birokrasi

Bappeda sebagai perangkat daerah dengan tupoksi perencanaan mempunyai fungsi untuk mengawal ketercapaian program-program prioritas yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi sehingga ketercapaian pembangunan di Maluku Utara dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan Visi Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara, maka Bappeda ikut mendukung dan terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-5 yaitu *“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan dengan tujuan misi ini adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis dan indikator tujuannya adalah Indeks Tata Kelola Pemerintahan, sedangkan untuk tercapainya tujuan tersebut maka sasarannya adalah Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah dengan indikator sasaran: Indesk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan. Keterlibatan Bappeda untuk misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara.*

Untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan melihat permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut ;
Tujuan Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah: *Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator tujuannya adalah Nominasi PPD.* Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran strategis Bappeda Provinsi



Maluku Utara adalah *Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah* dengan indikator *Persentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja)*.

Untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.1.
Matrix Keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD		Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
		Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator			
“Maluku Utara Sejahtera”	Misi 5 Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks perencanaan Pembangunan	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Tujuan: Nominasi PPD	Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Presentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD Renstra, RKPD Renja)



3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Bappeda Provinsi Maluku Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Target	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Capaian	Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				17.500.000.000				35.255.800.000
	PERENCANAAN				17.500.000.000				35.255.800.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malut	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj >80		5.000.000.000				10.380.800.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malut	Persentase implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1.100.000.000				1.680.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Malut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000			2 Dokumen	500.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Malut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	150.000.000



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Malut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Malut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Malut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	150.000.000
Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Malut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	200.000.000			1 laporan	150.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000			1 Laporan	430.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Malut	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	525.000.000			100%	600.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket				1 Paket	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Malut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	250.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Malut	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	125.000.000			1 Dokumen	150.000.000



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Malut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	200.000.000			2 Laporan	200.000.000
	Administri Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Malut	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100.000.000			100%	200.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Malut	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000			1 laporan	100.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Malut	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	50.000.000			1 laporan	100.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Malut	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	950.000.000			100%	1.250.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Malut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	300.000.000			1 paket	300.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malut	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	300.000.000			20 orang	500.000.000



Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang				70 Orang	200.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	200.000.000			70 Orang	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Malut	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.300.000.000			100%	2.950.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000			1 paket	150.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	300.000.000			1 paket	400.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malut	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	100.000.000			1 Paket	250.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	700.000.000			1 Dokumen	2.000.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Malut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malut	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	650.000.000			100%	1.400.000.000



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	150.000.000			1 Laporan	300.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Malut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000			1 Laporan	300.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000			1 Laporan	800.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Malut	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	375.000.000			100%	750.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Malut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Paket	375.000.000			1 Paket	750.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Malut	Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	100%	5.500.000.000			100%	10.119.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Malut	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	3.000.000.000			100%	5.650.000.000
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	400.000.000			3 Dokumen	1.300.000.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	300.000.000			3 Dokumen	350.000.000



**Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023**

	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	900.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	850.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000			1 Dokumen	1.800.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	650.000.000			2 Dokumen	450.000.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sofifi	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.150.000.000			100%	2.400.000.000
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	550.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	60 Orang	300.000.000			60 Orang	850.000.000



**Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023**

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60 Orang	300.000.000			60 Orang	650.000.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Malut	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	150.000.000			1 Buku	350.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Malut	Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100%	1.350.000.000			100%	2.069.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen	300.000.000			1 Dokumen	569.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Malut	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	350.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Dokumen	500.000.000			3 Dokumen	850.000.000
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Malut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	350.000.000			10 Dokumen	300.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Malut	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	7.000.000.000			100%	14.756.000.000



	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Malut	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	2.500.000.000			100%	5.088.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	400.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	15 Perangkat Daerah	200.000.000			15 Perangkat Daerah	450.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	15 Perangkat Daerah	200.000.000			15 Perangkat Daerah	500.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	1.087.500.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	475.000.000



Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	200.000.000			12 Perangkat Daerah	488.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	300.000.000			12 Perangkat Daerah	600.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Dokumen	700.000.000			7 Dokumen	1.087.500.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Malut	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	2.250.000.000			100%	4.459.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	300.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	200.000.000			6 Perangkat Daerah	400.000.000



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	200.000.000			6 Perangkat Daerah	430.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Dokumen	350.000.000			5 Dokumen	889.500.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen	500.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	200.000.000			4 Perangkat Daerah	500.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	300.000.000			4 Perangkat Daerah	550.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Dokumen	400.000.000			3 Dokumen	889.500.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Malut	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD dan APBD (persen)	100%	2.250.000.000			100%	5.209.000.000



**Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023**

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	250.000.000			2 Dokumen	550.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	200.000.000			3 Perangkat Daerah	500.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	300.000.000			3 Perangkat Daerah	600.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	450.000.000			2 Dokumen	850.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	250.000.000			2 Dokumen	560.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	200.000.000			5 Perangkat Daerah	650.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Malut dan Luar Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	200.000.000			5 Perangkat Daerah	649.000.000



**Rencana Kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023**

	Daerah Bidang Kewilayahan	Provinsi							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Malut dan Luar Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Dokumen	400.000.000			3 Dokumen	850.000.000



BAB IV

PENUTUP

Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Maluku Utara, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

Renja Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan upaya untuk mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana arahan Renstra Bappeda 2020-2024 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dan RKPD Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat menjadi panduan dari pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Provinsi Maluku Utara selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.